

REALISASI INSENTIF PPH FINAL UMKM YANG DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) DI MASA PANDEMI COVID-19

Ropinov Saputro

Administrasi Pajak K. Batang, Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro

Abstrak

UMKM berperan vital dalam ekonomi nasional. Sektor ini menyumbang PDB lebih dari 60% dan menurunkan pengangguran lebih dari 95%. Pandemi COVID-19 menyurutkan UMKM. UMKM perlu didukung agar mampu bertahan melewati tekanan akibat COVID-19. Pajak Penghasilan (PPH) Final UMKM ditanggung Pemerintah selama 6 bulan, sejak bulan April sampai September 2020 yang diperpanjang menjadi Masa Pajak Desember 2020 berdasarkan PMK 110 Tahun 2020. Tujuan dari pengabdian ini antara lain mensosialisasikan, sehingga masyarakat memahami, mampu mengimplementasikan, melaporkan insentif PPh final (DTP) ditanggung pemerintah di masa Pandemi. 15 pelaku UMKM mengikuti sosialisasi, kemudian mereka mengisi kuesioner evaluasi di Google Form yang dianalisa dengan SWOT. Hasil SWOT berada pada Kuadran I (5,2) yang disimpulkan bahwa pemerintah dapat menerapkan strategi agresif dalam mengelola perpajakan UMKM. Saran yang dihasilkan antara lain pemerintah memperpanjang masa insentif pajak UMKM, pelatihan realisasi insentif, pelatihan ketentuan perpajakan UMKM, pengembangan UMKM, kebijakan Pro UMKM, pemberian bantuan UMKM.

Kata Kunci: UMKM, Pajak, Pajak UMKM, PPh Final ditanggung Pemerintah, Pandemi Covid-19

Abstract

MSMEs play a vital role in the national economy. This sector accounts for more than 60% of GDP and reduces unemployment by more than 95%. The COVID-19 pandemic has discouraged MSMEs. MSMEs need to be supported in order to be able to survive the pressures caused by COVID-19. The MSME Final Income Tax (PPh) is borne by the Government for 6 months, from April to September 2020 which was extended to the December 2020 Tax Period based on PMK 110 of 2020. The purpose of this service is to socialize, so that the public understands, is able to implement, report PPh incentives. final payment (DTP) is borne by the government during the Pandemic. 15 MSME actors participated in the socialization, then they filled out an evaluation questionnaire on the Google Form which was analyzed with SWOT. The SWOT results are in Quadrant I (5.2) which concludes that the government can implement an aggressive strategy in managing MSME taxation. The suggestions generated include the government extending the MSME tax incentive period, training on the realization of incentives, training on MSME tax provisions, developing MSMEs, Pro MSME policies, providing MSME assistance.

Keywords: MSMEs, Taxes, MSME taxes, Final Taxes borne by the Government, the Covid-19 pandemic

Correspondence author: Ropinov Saputro, ropinov@lecturer.undip.ac.id, Semarang, Indonesia



This work is licensed under a CC-BY-NC

PENDAHULUAN

KPP Pratama (Kantor Pelayanan Pajak) Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menargetkan penerimaan pajak tahun 2020 di Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal mencapai Rp1,01 triliun. Target penerimaan tahun ini Rp1,01 triliun, diharapkan dapat diperoleh dari KPPP Batang Rp600 miliar dan sisanya dari KPPP Kendal. Realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Kabupaten Batang sempat mengalami anjlok pada 2019 yakni hanya sebesar 80,08% dari target yang telah ditetapkan atau Rp.496,466 miliar. Adapun faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak pada 2019, kata dia, adalah sudah selesainya proyek pembangunan jalan tol dan PLTU Batang. Saat ini, realisasi penerimaan pajak di Kabupaten Batang hanya mengandalkan Pajak Penghasilan. Selain target realisasi penerimaan pajak, kata dia, KPP Pratama Batang, juga menargetkan tingkat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dapat meningkat. (Istibsaroh & Kutnadi, 2020)

Pemerintah berjuang memacu peningkatan penerimaan pajak dari para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia, melihat masih minimnya kontribusi pajak dari sektor tersebut meskipun secara kuantitas jumlah pelaku usaha UMKM terbilang mayoritas. Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengatakan bahwa hingga saat ini, UMKM menempati hingga 65% dari kategori jumlah pelaku usaha dalam perekonomian Indonesia, namun dari kategori jumlah pembayar pajak, baru mencapai 1,8 juta UMKM (Sukarno, 2019). Kondisi ini membuat pemerintah menawarkan kemudahan dalam pembayaran pajak bagi UMKM. Fasilitas tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang menurunkan pajak penghasilan (PPh) Final UMKM dari 1% menjadi 0,5% (Meikhati & Kasetyaningsih, 2019). Dengan penurunan tarif pajak UMKM menjadi 0,5% tentunya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak UMKM mampu meningkatkan penerimaan pajak di sektor UMKM yang akan mendukung pembangunan nasional (Hartadi, Suryono, & Mildawati, 2020).

Dalam rangka mengatasi ekonomi yang terdampak pandemi covid-19, Pemerintah batal menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari 0,5% menjadi 0%. Skema keringanan pajak yang diambil, berupa PPh ditanggung pemerintah (DTP), sejak April hingga September mendatang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dengan skema ini, UMKM akan dibebaskan dari kewajiban pembayaran PPh final selama enam bulan (Laoli et al, 2020).

Pada tahun 2016 Kabupaten Batang menempati posisi 3 sebagai Kota/Kabupaten dengan jumlah UMKM terbanyak se-Jawa Tengah. Terlebih lagi dewasa ini di Batang, muncul wirausahawan-wirausahawan baru berbasis teknologi yang sebagian juga mendirikan bisnis *start up* (Rintisan) yang didukung dan didorong oleh Pemerintah Kabupaten Batang melalui kebijakan seperti pendampingan pemasaran produk UMKM Batang, Mewajibkan ASN membeli produk UMKM dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan pemerintah Kabupaten Batang dalam rangka merangsang pertumbuhan UMKM dan membantu UMKM bertahan dari tekanan pasar global. Dengan jumlah dan pertumbuhan UMKM yang sangat besar tentunya UMKM Kabupaten Batang mampu memberikan kontribusi perpajakan UMKM yang juga besar. Hal itu sejalan dengan program prioritas mencetak 1.000 wirausahawan baru. (Saputro & Meivira, 2020)

METODE PELAKSANAAN

Waktu dan Tempat

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober hingga 5 Desember 2020, termasuk di dalam rentang waktu ini adalah peninjauan, survei, dan wawancara terhadap Camat Batang dan perwakilan UMKM di Kecamatan Batang. Mengingat masa Pandemi Covid-19, maka kegiatan pengabdian ini dilakukan secara daring dengan menggunakan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK).

Alat yang Digunakan

Seluruh alat yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan perangkat lunak dari TIK, diantaranya Laman situs pajak.go.id, aplikasi whatsapp, Youtube, Google Form, dan Laptop/Smartphones dari masing-masing peserta.

Metode Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengambil topik Pajak UMKM 0,5% dan Kecamatan Batang tentunya yang menjadi objek/peserta kegiatan ini adalah Pelaku UMKM yang berdomisili di Kecamatan Batang dimana data Pelaku UMKM diperoleh dari Kantor Kecamatan Batang. Populasi berjumlah 88 UMKM yang terdiri dari berbagai kegiatan usaha UMKM, jumlah modal, sarana usaha, usia UMKM, kontak dan lain-lain. *Purposive sampling* menurut Sugiyono (2011:68), adalah sebagai berikut: “Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Berdasarkan landasan tersebut penulis menentukan 15 peserta yang memenuhi syarat, Wajib Pajak yang aktif memanfaatkan teknologi internet dalam usaha UMKM. Modul yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah sebuah modul elektronik berwujud video yang diunggah pada platform Youtube. Hal ini dilakukan karena adanya pembatasan sosial terkait dengan Pandemi *Corona Virus Disease Covid-19*, selain juga perwujudan semangat Revolusi Industri 4.0 yang secara tidak langsung merupakan sosialisasi penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada para peserta kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2011: 142). Kuesioner yang dipergunakan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah kuesioner yang diketik berdasarkan pada indikator-indikator penguasaan materi/modul kegiatan, yang diubah ke dalam kuesioner elektronik menggunakan platform Google Form yang memuat 10 pertanyaan pilihan ganda dan 2 pertanyaan *essay* terkait dengan topik kegiatan ini. Dalam rangka mencapai luaran kegiatan berupa saran strategi perpajakan UMKM kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sebagai pengelola pengembangan UMKM, kegiatan ini menggunakan Analisis *SWOT (Strength Weakness Opportunity Threat)*.

Tabel 1. Student Distribution Frequency Kriteria Penilaian Jawaban Kuesioner

No	Pernyataan	Persentase Jawaban					SS + S + CS
		STS	TS	CS	S	SS	
1.	Anda menjadi paham bahwa UMKM yang sebenarnya wajib membayar pajak, di masa pandemi Covid-19 ini pajak anda ditanggung pemerintah namun anda harus tetap melaporkan realisasi insentif (penghematan) pajak UMKM yang telah anda peroleh	0	0	0	33.3%	66.7%	100%

2.	Anda menjadi paham alur penyampaian realisasi insentif PPh final UMKM (DTP) di masa Pandemi Covid-19 dan ingin belajar lebih	0	0	0	33.3%	66.7%	100%
3.	Anda memahami cara penyampaian realisasi insentif PPh final UMKM (DTP) di masa Pandemi Covid-19 melalui e-reporting	0	0	53.3%	20%	26.7%	100%
4.	Anda ingin melaporkan realisasi insentif PPh final UMKM (DTP) karena Pandemi Covid-19 melalui e-reporting/konsultasi ke KPP Pratama	0	6.7%	26.7%	33.3%	33.3%	93.3%
5.	Sampaikan pelatihan apa saja yang dibutuhkan oleh usaha anda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utang 2. Pemasaran online marketing medsos 3. penjualan dan pajak murah 4. modal 5. Menambah modal 6. Pelatihan mencari modal 7. Bantuan pemasaran di masa corona 8. Latihan marketing online meningkatkan jualan 9. Cara mengelola bawahan 10. Cara melatih bawahan 11. Pemasaran 12. Latihan memimpin usaha, pemasaran online 13. Pelatihan memimpin anak buah 14. Butuh pelatihan online penjualan dan modal 15. Diklat mengelola organisasi/karyawan dan keuntungan membayar pajak 					

Tabel 2. Indikator Analisis SWOT

SWOT	No	INDIKATOR	BOBOT
Strength (Internal)	a	Insentif PPh Final UMKM sangat membantu UMKM	5
	b	Kemudahan penyampaian realisasi melalui e-reporting	5
Weakness (Internal)	c	Lemahnya pengetahuan Wajib Pajak UMKM	6
	d	Kurangnya Pembinaan dan pelatihan UMKM	4
Opportunity (Eksternal)	e	Banyaknya UMKM yang bertahan di masa pandemi	4
	f	Banyaknya bantuan UMKM dari pemerintah pusat	6
Threat (Eksternal)	g	Menurunnya jumlah konsumen karena pandemi	7
	h	UMKM sulit mengembangkan usaha karena pandemi	3

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap Identifikasi Masalah

Pada awal perencanaan kegiatan, pemilihan topik dilakukan melalui identifikasi masalah sesuai topik yang dibidik dengan melakukan wawancara secara daring kepada Camat Batang, dan beberapa perwakilan pelaku UMKM di Kecamatan Batang. Hasil wawancara ini divalidasi dengan sumber literatur peraturan realisasi insentif PPh Final dan juga berita-berita relevan.

Melalui FGD yaitu dengan membandingkan data dengan literatur yang ada, diputuskanlah topik kegiatan ini untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada masyarakat di bidang realisasi insentif PPh Final yang ditanggung pemerintah (DTP) khususnya untuk pelaku UMKM Kecamatan Batang.

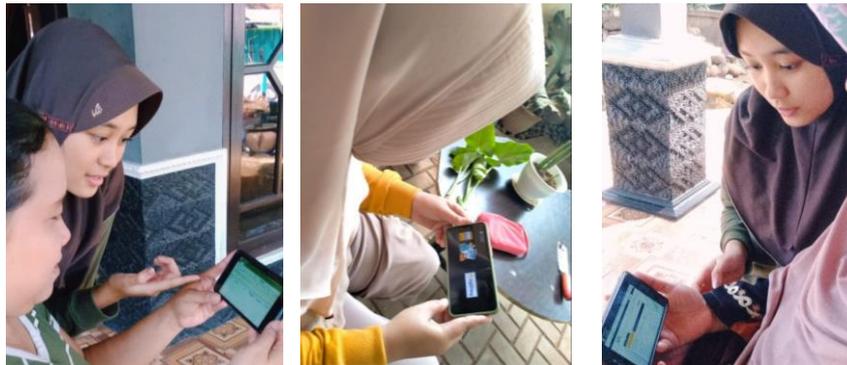
Tahap Sosialisasi

Setelah topik dan subjek kegiatan ditentukan, tim membuat modul dan narasinya. Dilanjutkan dengan membuat modul digital berupa video sosialisasi realisasi insentif PPh yang ditanggung pemerintah (DTP). Untuk memonitoring dan mengevaluasi kegiatan, tim meminta *feedback* peserta kegiatan berupa kuesioner daring dengan media Google

Form. Link modul digital dan kuesioner disampaikan kepada para peserta melalui Whatsapp. Sementara data UMKM di dapat dari Kecamatan Batang.

Tahap Pelatihan

Peserta melihat modul digital melalui media Youtube yang didalamnya terdapat pendahuluan seperti kondisi UMKM di Indonesia pada umumnya, dan UMKM di Kecamatan Batang pada Khususnya. Dilanjutkan dengan kondisi Pandemi Covid-19 yang memberi dampak dahsyat kepada UMKM termasuk UMKM di Kecamatan Batang. Tim menjelaskan mengenai potensi perpajakan UMKM yang potensial dalam membantu pembangunan negara. Masuk pada inti modul digital, berisi mengenai tata cara pelaporan realisasi insentif PPh Final yang ditanggung pemerintah (DTP).

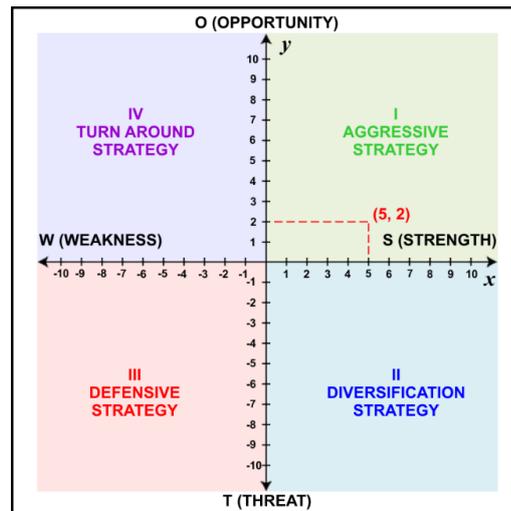


Gambar 1 Sosialisasi Realisasi Insentif PPh DTP UMKM Kecamatan Batang

Mayoritas peserta kegiatan telah memiliki NPWP, dimana ini menjadi salah satu indikator pengetahuan pelaku UMKM Kecamatan Batang terhadap ketentuan perpajakan. Namun, meski telah menikmati insentif pajak namun baru 1 peserta yang sudah menyampaikan laporan realisasi insentif PPh final UMKM, dimana hal ini terjadi karena peserta belum banyak paham mengenai cara pelaporan realisasi insentif melalui e-reporting. Minat pelaporan realisasi insentif PPh Final, pendataan NPWP baru dan peningkatan penyampaian SPT merupakan basis data pajak yang dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk mengembangkan dan membina UMKM kedepan utamanya perpajakannya.

Monitoring dan Evaluasi

Dalam rangka menunjang monitoring dan evaluasi, peserta yang sudah memahami dan mempraktekkan modul digital diminta untuk memberikan *feedback* melalui kuesioner di media Google Form yang sekaligus merupakan daftar presensi bagi peserta kegiatan. Data yang terkumpul kemudian di analisa dengan SWOT. Hasil pengolahan data menghasilkan kondisi perpajakan UMKM Kecamatan Batang berada pada Kuadran I yang merupakan kesempatan bagi *Stakeholders* seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah Kabupaten Batang, pelaku UMKM serta pihak lainnya, untuk menerapkan kebijakan agresif dalam mendorong UMKM Kecamatan Batang termasuk bidang perpajakannya. Kebijakan agresif ini diprediksi mampu membantu UMKM Kecamatan Batang bertahan di masa Pandemi Covid-19, menaati peraturan perpajakan yang pada akhirnya membantu pembangunan negara khususnya di masa Pandemi.



Gambar 2 Kuadran Analisis *SWOT*

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan secara daring dengan tema Workshop Realisasi Insentif PPH Final UMKM yang Ditanggung Pemerintah (DTP) di Masa Pandemi Covid-19 ini dikategorikan berhasil dan menghasilkan beberapa temuan. Temuan utamanya adalah 70% dari peserta kegiatan menjawab sesuai persyaratan keberhasilan atas pertanyaan kuesioner daring dalam Google Form, setelah peserta mengikuti modul pelatihan secara daring di youtube, yang mana ini merupakan kriteria/indikator keberhasilan kegiatan. Temuan tambahan lainnya yang menjadi keberlanjutan kegiatan ini adalah adanya kebutuhan dari peserta kegiatan mengenai pendidikan dan pelatihan terkait UMKM yang mereka jalankan, antara lain: pemasaran online UMKM di masa pandemi Covid-19, kepemimpinan dan organisasi UMKM, serta pengembangan dan permodalan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartadi, G., Suryono, B., & Mildawati, T., (2020). Pemahaman Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21 (1), 2020, 1-13. DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i1.824>
- Itibsaroh, Nur & Kutnadi. Batang targetkan penerimaan pajak Rp1,01 triliun. *Antaranews.com*. <https://jateng.antaranews.com/berita/298970/batang-targetkan-penerimaan-pajak-rp101-triliun>, diakses pada 7 Agustus 2020
- Kasetyaningsih, S.W. & Meikhati, E. (2019). Pengaruh Penerapan PP 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS*. Surakarta: 4 September 2019. Hal. 050-059
- Laoli et al. (2020, Mei 2). Terdampak corona, PPh UMKM 0,5% ditanggung negara selama 6 bulan. *Kontan.co.id*. <https://nasional.kontan.co.id/news/terdampak-corona-pph-umkm-05-ditanggung-negara-selama-6-bulan>, diakses pada 7 Agustus 2020

- Saputro, R. & Meivira, F. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. *Jurnal EMBA Vol.8 No.4 Oktober 2020, Hal. 1059-1068*. DOI: <https://doi.org/10.35794/emba.v8i4.31308>
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (p68142)*. Bandung: Afabeta
- Sukarno, PA. (2019, Mei 2). Masih Minim, Penerimaan Pajak dari Sektor UMKM. *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190502/259/917630/masih-minim-penerimaan-pajak-dari-sektor-umkm>, diakses pada 7 Agustus 2020
- Wulandari, L.A. (2020, Januari 8). Perpajakan Dasar untuk UMKM Pemula. *Pajak.go.id*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/perpajakan-dasar-untuk-umkm-pemula>, diakses pada 7 Agustus 2020